

**ANALISIS EVALUASI LAPORAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

**LAPORAN MAGANG**



Disusun Oleh :

Nama : Sofiani Oktafiana Putri

NIM : 21312287

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS EVALUASI LAPORAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

**LAPORAN MAGANG**



Disusun Oleh :

Nama : Sofiani Oktafiana Putri

NIM : 21312287

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan  
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
sarjana strata-1 pada Program Studi Akuntansi Program Sarjana,  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,  
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : **Sofiani Oktafiana Putri**

NIM : **21312287**

Program Studi : **Akuntansi**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : .....

Dosen Pembimbing:

**(Mahmudi, Dr.,M.Si.,CMA.)**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
**2025**

## LEMBAR PENYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam tugas akhir tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai ketentuan yang berlaku”

Yogyakarta, 2025

Penulis



**Sofiani Oktafiana Putri**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG**  
**ANALISIS EVALUASI LAPORAN KINERJA**  
**PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1A**

Disusun Oleh :

Nama : Sofiani Oktafiana Putri

NIM : 21312287

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui dan disahkan untuk ujian Tugas Akhir Strata-1

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Disahkan oleh,



**(Mahmudi, Dr.,M.Si.,CMA.)**

## ABSTRAK

### ANALISIS LAPORAN KINERJA

#### PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1 A

Sofiani Oktafiana Putri

Laporan magang ini membahas analisis dan evaluasi laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menilai kesesuaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mengkaji pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang, wawancara dengan pegawai terkait, serta studi dokumentasi dan studi pustaka terhadap dokumen kinerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan mencerminkan Upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan hasil yang cukup baik serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada penguatan indikator kinerja berbasis outcome, pendalaman analisis keterkaitan antara anggaran dan hasil kinerja, serta peningkatan keterbukaan informasi laporan kinerja kepada Masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan dan penyajian laporan kinerja diperlukan guna mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja di masa mendatang.

Kata Kunci : *Laporan Kinerja, Akuntabilitas, Transparansi, LKjIP, Pengadilan Negeri Sleman.*

## ABSTRACT

This internship report discusses the analysis and evaluation of the performance report of the Sleman District Court Class 1A as a form of accountability for the performance of government agencies. The purpose of writing this report is to assess the conformity of the preparation of the Government Agency Performance Report (LKjIP) with the guidelines of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), as well as to review the achievement of established performance indicators. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through observations during the internship, interviews with related employees, as well as documentation and literature studies of performance documents and applicable laws and regulations. The results of the analysis indicate that in general the preparation of the Sleman District Court Class 1A performance report has followed applicable provisions and reflects efforts to implement the principles of accountability and transparency. Performance achievements and budget realization show quite good results and are supported by the use of information technology in public services. However, there are still several aspects that need to be improved, especially in strengthening outcome-based performance indicators, deepening the analysis of the relationship between the budget and performance results, and increasing the transparency of performance report information to the public. Therefore, continuous improvement in the preparation and presentation of performance reports is necessary to support increased accountability and transparency in future performance.

Keywords: *Performance Report, Accountability, Transparency, LKjIP, Sleman District Court.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, puji syukur saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang dengan judul “**Analisis Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A**” dibuat dan diajukan sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulisan laporan yang disusun oleh penulis mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun terselesainya penulisan tugas akhir ini tidak pernah lepas dari doa, usaha, motivasi, dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang selalu menjadi sumber kekuatan spiritual dan inspirasi dalam setiap Langkah.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Urip Suparjo dan Ibu Muji Rahayu. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan tanpa batas yang diberikan sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih Impian serta menjadi semangat terbesar dalam menempuh pendidikan ini.
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika khususnya Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta teladan selama masa perkuliahan.
4. Dosen pembimbing penulis, Bapak Mahmudi, Dr.,M.Si.,CMA yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, nasehat, saran, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ini dengan lancar dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
5. Diri sendiri yang sudah mau berjuang dan berusaha untuk melakukan dan memberikan hasil yang terbaik.
6. Rekan-rekan mahasiswa, sahabat, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, bantuan dan kebersamaan sehingga proses penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dukungan baik secara materil maupun imateril selama masa

pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Semoga Allah SWT membalas amal baik tersebut. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2025

Penulis

**Sofiani Oktafiana Putri**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABLE.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Perumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan Magang .....	3
1.4    Manfaat Magang.....	3
1.5    Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II.....</b>	<b>6</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1    Landasan Teori .....	6
2.2    Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB III .....</b>	<b>13</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
3.1    Pendekatan Penelitian .....	13
3.2    Lokasi dan Waktu Magang.....	13
3.3    Subjek dan Objek Penelitian .....	14
3.4    Jenis dan Sumber data.....	14
3.5    Teknik Pengumpulan Data .....	15
3.6    Teknik Analisis Data .....	16
3.7    Bagan Alur Penelitian.....	17
<b>BAB IV .....</b>	<b>18</b>

<b>HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG.....</b>	<b>18</b>
4.1    Profil Instansi Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.....	18
4.2    Aktivitas Magang .....	24
<b>BAB V .....</b>	<b>31</b>
<b>ANALISIS DAN HASIL .....</b>	<b>31</b>
5.1    Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja .....	31
<b>BAB VI.....</b>	<b>38</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
6.1    Kesimpulan .....	38
6.2    Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4. 1. Rencana Pelaksanaan Program Magang .....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Lokasi PN Sleman .....	14
Gambar 3. 2. Bagan Alur Penelitian .....	17
Gambar 4. 1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A .....	20
Gambar 5. 1. Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan.....	35
Gambar 5. 2. Dokumentasi Kegiatan Scan Berkas Laporan dan Kwitansi .....	36
Gambar 5. 3. Dokumentasi Berkas Pembuatan Slip Gaji dan Surat Perintah Bayar.....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di wilayah yurisdiksinya, serta efektivitas kinerjanya, setiap Pengadilan Negeri diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodic. Laporan ini menjadi instrument penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Bovens menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekedar menyampaikan laporan, tetapi merupakan proses yang melibatkan kewajiban untuk menjelaskan, memberi alasan dan mempertanggungjawabkan mengembangkan konsep bahwa akuntabilitas terdiri atas komponen informasi, diskusi dan pertanggungjawaban.

Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A Yogyakarta, sebagai salah satu institusi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan peradilan yang adil, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, laporan kinerja yang disusun oleh pengadilan seharusnya mampu mencerminkan capaian kinerja yang objektif, terukur, dan relevan dengan indicator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis mahkamah agung maupun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L). Berdasarkan (MA-RI,2022),laporan tahunan Mahkamah Agung memberikan gambaran umum mengenai standar kinerja peradilan di Indonesia, termasuk penyelesaian perkara, pemanfaatan teknologi informasi, serta capaian program prioritas reformasi birokrasi. Dokumen ini menegaskan bahwa seluruh pengadilan termasuk Pengadilan Negeri Sleman harus mengikuti pedoman pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Gambaran Dalam laporan keuangan merupakan seni mencatat, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan secara sistematis laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik, laporan kinerja menjadi salah satu alat penting untuk mengevaluasi pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berdasarkan PermenPAN RB No.53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan PK dan Pelaporan Kinerja mengatur secara teknis bagaimana instansi pemerintah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam permen tersebut mengatur mengenai struktur LKjIP, indikator kinerja utama (IKU), analisis capaian dan mekanisme evaluasi. Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dituntut untuk menyusun laporan kinerja secara berkala. Berdasarkan Perpres 29/2014 yang merupakan dasar utama pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan PN Sleman untuk menyusun laporan kinerja untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, serta capaian tujuan organisasi. Laporan ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana evaluasi internal untuk peningkatan mutu layanan publik. Evaluasi terhadap laporan kinerja penting dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

Menurut (Mardiasmo,2018), secara komprehensif menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana public secara transparan, efektif dan efisien. Beliau menekankan bahwa laporan kinerja merupakan instrument penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, akuntabilitas tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban kinerja seperti kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan organisasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A Yogyakarta telah disusun sesuai dengan pedoman evaluasi kinerja lembaga peradilan?
2. Bagaimana pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan indicator-indikator kinerja yang telah ditetapkan?

## **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan penulisan laporan magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis apakah Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A Yogyakarta telah disusun sesuai dengan prinsip pedoman evaluasi kinerja.
2. Untuk mengevaluasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan indicator-indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman evaluasi kinerja yang berlaku.
3. Untuk memberikan rekomendasi strategis guna peningkatan kualitas laporan kinerja dimasa mendatang.

## **1.4 Manfaat Magang**

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan magang, antara lain :

1. Bagi Penulis
  - a. Penulis dapat mempraktekkan dan menerapkan ilmu pengetahuan perkuliahan secara langsung di lapangan kerja.
  - b. Menambah pengetahuan, pengalaman di lapangan kerja mengenai dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya.

- c. Menambah wawasan tentang implementasi akuntansi sektor publik dan evaluasi kinerja di lembaga pemerintahan.
2. Bagi Instansi
    - a. Memberikan masukan konstruktif terhadap proses evaluasi laporan kinerja.
    - b. Hubungan baik yang tercipta antara pihak instansi dengan Universitas Islam Indonesia.
  3. Bagi Prodi Akuntansi FBE UII
    - a. Menjadi kontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi sektor publik.
    - b. Meningkatkan kualitas hubungan baik dan menambah relasi terhadap Masyarakat luas.
    - c. Memberikan saran kepada penelitian di masa depan pada instansi yang sama.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini disusun untuk memberikan Gambaran yang jelas, runtut dan terstruktur mengenai keseluruhan isi laporan. Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini sebagai berikut :

**BAB I** memuat pendahuluan yang berisi uraian mengenai **latar belakang masalah** dengan membahas pokok analisis, yang menjelaskan mengenai pentingnya menyusun laporan kinerja di instansi pemerintah terutama di instansi Pengadilan Negeri Sleman. **Rumusan masalah** mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan di cari atau bahas. **Tujuan magang** menjelaskan apa yang dicapai melalui magang ini. **Manfaat magang** menjelaskan mengenai manfaat apa yang diperoleh. Terakhir, **sistematika penulisan** memberikan Gambaran tentang struktur laporan magang yang saya susun.

**BAB II** membahas dasar teori yang terkait dengan permasalahan dalam analisis. Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang relevan sebagai dasar dalam analisis, seperti konsep manajemen kinerja, evaluasi kinerja,

akuntabilitas publik, pengukuran kinerja sektor publik serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam laporan dan juga adanya beberapa daftar tabel penelitian terdahulu.

**BAB III** menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan magang, lokasi dan waktu pelaksanaan magang, subjek dan objek penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digambarkan di bagan alur penelitian.

**BAB IV** berisi gambaran umum mengenai instansi tempat magang, termasuk Sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta penjelasan rinci mengenai aktivitas magang yang dilakukan selama periode magang.

**BAB V** berisi tentang memaparkan hasil analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi kinerja di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A serta temuan-temuan yang diperoleh selama magang. Analisis ini didukung oleh teori dalam kajian Pustaka dan data lapangan.

**BAB VI** berisi tentang Kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditunjukkan kepada instansi terkait maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Manajemen Kinerja**

Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja suatu organisasi agar sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Menurut (Armstrong dan Baron,2005) manajemen kerja adalah *“a strategic and integrated approach to delivering sustained success to organizations by improving the performance of the peoplewho work in them and by developing the capabilitied of teams and individual contributors.”* Dalam konteks lembaga public, manajemen kinerja tidak hanya mengacu pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mencerminkan seberapa efektif organisasi dalam memberikan pelayanan kepada oublik secara efisien dan berkeadilan. Kemudian menurut (Schwarz,1999), manajemen kinerja sebnagai gaya manajemen yang didasarkan pada komunikasi terbuka antara manajer kepada karyawan, dan sebaliknya. Dengan kata lain, merupakan suatu proses yang kolaboratif dan terus-menerus yangh melibatkan dialog dua arah untuk memastikan bahwa semua orang berada di jalur yang benar. (Mahmudi,2019) menjelaskan bahwa manajemen kinerja sektor public harus mencakup pengukuran, efisiensi, efektivitas, ekonomis dan akuntabilitas dengan memperkenalkan konsep value for money yang sangat penting dalam menilai bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil terbaik

Manajemen kinerja membantu memastikan bahwa semua orang di organisasi memahami peran mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan sehingga dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Selain itu, manajemen kinerja memberikan platform bagi karyawan untuk berkembang melalui umpan balik yang konstruktif dan pelatihan yang tepat. Dengan

memahami dan menerapkan manajemen kinerja, dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja dan pada akhirnya mencapai tujuan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut (Mahsun,2006), pengukuran kinerja sektor public tidak hanya menilai output, tetapi juga outcome dan dampak jangka Panjang. Ia menegaskan bahwa kinerja organisasi harus diukur dari kemanfaatan yang dirasakan oleh Masyarakat, bukan hanya jumlah kegiatan yang dilakukan

### **2.1.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Robbins,2017) kinerja organisasi dapat diukur melalui capaian target, kualitas pelayanan, serta kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan teratur dapat membantu mengingatkan para karyawan terkait harapan dan tuntutan perusahaan kepada mereka. Evaluasi kinerja juga dapat mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian, kolaborasi dan bahkan hambatan yang sedang dihadapi.

### **2.1.3 Konsep Kinerja Organisasi Publik**

Kinerja organisasi publik adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan yang telah direncanakan oleh lembaga pemerintah dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Mahmudi (2019) menyebut kinerja sektor publik sebagai “capaian prestasi instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut (Mahsun,2006) pengukuran kinerja sektor publik memiliki beberapa tujuan utama :

1. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
2. Memberikan dasar evaluasi dalam perbaikan kinerja.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah.
4. Menjadi sarana komunikasi kepada Masyarakat mengenai capaian dan tanggung jawab organisasi publik.

#### **2.1.4 Teori Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan organisasi publik. Menurut (Bovens,2007) akuntabilitas adalah kewajiban organisasi public untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya serta hasil yang dicapai kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengadilan, akuntabilitas tercermin melalui keterbukaan dalam laporan kinerja, publikasi putusan, serta pelayanan masyarakat yang dapat diakses secara transparan. Menurut (Mardiasmo,2018) akuntabilitas sektor public terbagi menjadi:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran : kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kode etik peradilan.
2. Akuntabilitas Manajerial : efisiensi dan efektivitas dalam mengelola anggaran serta sumber daya pengadilan.
3. Akuntabilitas Program : sejauh mana program/kegiatan peradilan berjalan sesuai tujuan.
4. Akuntabilitas Kebijakan : pertanggungjawaban atas keputusan dan putusan yang berdampak pada Masyarakat pencari keadilan.
5. Akuntabilitas Finansial : transparansi penggunaan anggaran yang berasal dari APBN.

Akuntabilitas publik dalam sistem peradilan atau pengadilan negeri, termasuk PN Sleman, wajib Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Pepres No.29 Tahun 2014. Menurut LKjIP, pengadilan melaporkan :

1. Jumlah perkara yang masuk, diputus, dan yang masih berjalan
2. Tingkat kepuasan pencari keadilan
3. Kinerja pelayanan administrasi pengadilan
4. Efisiensi penggunaan anggaran

Selain itu, Mahkamah Agung RI mewajibkan setiap pengadilan negeri menerapkan Transparansi Informasi Peradilan (berdasarkan SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 dan pembaruan melalui Perma No. 3 Tahun 2018) sehingga masyarakat dapat mengakses jadwal sidang, putusan dan layanan secara online. Dalam praktiknya, PN Sleman menjalankan akuntabilitas publik melalui :

1. Laporan Kinerja (LKjIP PN Sleman) : disampaikan ke MA dan dipublikasikan secara terbuka.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) : mempermudah masyarakat mengakses layanan peradilan secara transparan.
3. Publikasi Putusan melalui Direktori Putusan MA : masyarakat dapat melihat putusan secara terbuka.
4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : alat evaluasi pelayanan publik di PN Sleman.
5. Whistleblowing System dan Pengaduan Masyarakat : wadah melaporkan dugaan pelanggaran etika maupun maladministrasi.

Dalam relevansi evaluasi kinerja dan penerapan teori akuntabilitas publik di PN Sleman menekankan bahwa :

1. Transparansi laporan kinerja meningkatkan kepercayaan publik.
2. Mekanisme pelaporan dan pengawasan internal maupun eksternal memastikan kualitas layanan hukum.
3. Akuntabilitas publik mendorong pengadilan untuk tidak hanya sekedar menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan pelayanan hukum yang cepat, adil dan transparan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pembandingan dan penguat dalam penyusunan kajian literatur. Tabel berikut merangkum penelitian-penelitian yang relevan dengan focus analisis mengenai akuntabilitas dan transparansi kinerja pada instansi pemerintah, khususnya peradilan.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

<b>NO</b>	<b>PENELITI (Tahun)</b>	<b>JUDUL</b>	<b>METODE</b>	<b>HASIL</b>	<b>RELEVANSI</b>
1	Mardiasmo (2018)	Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Studi Pustaka	Akuntabilitas merupakan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran secara transparan.	Menjadi landasan utama analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman
2	Mahmudi (2019)	Manajemen Kinerja Sektor Publik	Deskriptif	Efektivitas, efisiensi dan Value for Money menjadi dasar pengukuran kinerja sektor public	Menjadi rujukan dalam menganalisis efektivitas kinerja PN Sleman
3	Mahsun (2006)	Pengukuran Kinerja Sektor Publik	Teoritis	Pengukuran kinerja harus meliputi output, outcome, dan dampak layanan	Menguatkan analisis perlunya PN Sleman menilai outcome layanan publik
4	Bovens (2007)	Analysing and Assessing Accountability	Studi Teori Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan penjelasan dan	Menjadi dasar teori akuntabilitas dalam menilai

				pertanggungjawaban kepada public	laporan kinerja PN Sleman
5	Armstrong & Baron (2005)	Performance Management	Studi konseptual	Manajemen kinerja meningkatkan efektivitas organisasi melalui penyelarasan tujuan dan kinerja individu.	Mendukung teori manajemen kinerja dalam analisis laporan kinerja PN Sleman
6	Putri dan Nugroho (2020)	Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan SAKIP	Kualitatif	SAKIP meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaporan kinerja OPD	Relevan karena PN Sleman menerapkan kerangka SAKIP dan LKjIP
7	Rahmawati (2021)	Transparansi Pelayanan Publik pada Lembaga Peradilan	Studi Kualitatif	SIPP meningkatkan akses public terhadap proses persidangan dan putusan	Menjadi referensi utama dalam menilai transparansi PN Sleman
8	KemenPAN RB (2022)	Evaluasi SAKIP Nasional	Analisis Kinerja	Menemukan kelemahan umum pada indikator outcome dan ketepatan IKU ODP	Memberikan konteks pembandingan terhadap evaluasi kinerja PN Sleman

9	Mahkamah Agung RI (2022)	Laporan Tahunan MA	Analisis Deskriptif	Menetapkan standar kinerja peradilan : penyelesaian perkara, pelayanan public dan transparansi	Menjadi benchmark kinerja bagi PN Sleman
---	--------------------------	--------------------	---------------------	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

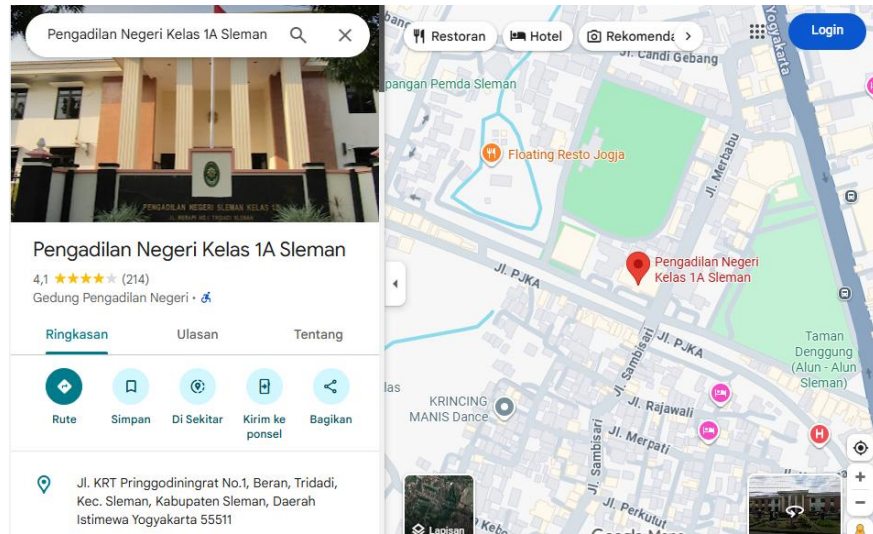
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengevaluasi laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A berdasarkan teori kinerja organisasi publik dan prinsip akuntabilitas. Menurut (Moloeng, 2007:6) memahami jenis penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Entah dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Magang**

##### **3.1.1 Lokasi pelaksanaan Magang**

Nama Instansi : Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A

Alamat : Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511



*Gambar 3. 1. Lokasi PN Sleman*

### **3.1.2 Waktu Pelaksanaan**

Program Magang di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A dilaksanakan pada 1 Mei – 10 Agustus 2025 selama 3 bulan 10 hari. Selama pelaksanaan magang, setiap karyawan baik tetap maupun karyawan magang wajib menaati peraturan sesuai dengan SOP yang berlaku di lingkungan magang tersebut.

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

- Subjek penelitian : pegawai/staf bagian perencanaan, bagian umum, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Sleman yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan kinerja.
- Objek penelitian : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A tahun terakhir serta proses penyusunannya.

### **3.4 Jenis dan Sumber data**

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui observasi langsung selama magang, wawancara dengan pegawai, dan pengalaman partisipatif di lingkungan kerja magang. Seperti melakukan pengamatan proses penyusunan laporan kinerja,

mekanisme pengumpulan data kinerja atau pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan, :

- Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) PN Sleman
- Laporan Tahunan PN Sleman
- Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang SAKIP
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan SK KMA terkait keterbukaan informasi publik
- Buku, jurnal dan penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan evaluasi kinerja publik

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

#### 1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Pengumpulan data yang dilakukan selama kegiatan magang dengan mengamati kondisi nyata dilapangan, mengetahui sistem kerja dan interaksi antar bagian dalam penyusunan laporan kinerja. Dalam observasi diperlukan catatan seperti mengamati atau mencatat obyek yang ada di instansi secara langsung untuk memenuhi data yang tertulis tentang informasi demografis waktu, tempat, tanggal dan setting lapangan pengamatan berlangsung.

#### 2. Wawancara (Interview)

Menurut (Sugiyono,2010) Wawancara Adalah metode pengambilan data dengan Menyusun perencanaan untuk mengembangkan dan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian merekam jawaban selama wawancara tersebut berlangsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pegawai yang berkompeten dengan tujuan memperoleh data mendalam tentang proses penyusunan LKjIP, hambatan dan upaya peningkatan

akuntabilitas. Metode wawancara yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap staff keuangan yakni bendaha penerimaan, berikut daftar pertanyaan yang saya ajukan :

1. Apakah Tunjangan Kinerja berlaku untuk semua staff (hakim/non hakim) di PN Sleman ?
2. Mengapa pelaporan kinerja itu wajib di buat di instansi Pengadilan Negeri Sleman?
3. Apakah seluruh informasi kinerja, seperti jumlah perkara, putusan dan layanan dipublikasikan secara lengkap dan tepat waktu?
4. Apakah capaian kinerja bagian keuangan, terutama PNBK, menjadi bagian dari evaluasi LKjIP setiap akhir tahun ?
5. Apakah Laporan Kinerja Pengadilan disusun sesuai dengan pedoman evaluasi kinerja lembaga peradilan ?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah dan menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Menurut (Sugiyono,2019) dokumentasi merupakan Teknik memperoleh data dari catatan, arsip, laporan, buku, foto atau dokumen yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun elektronik.

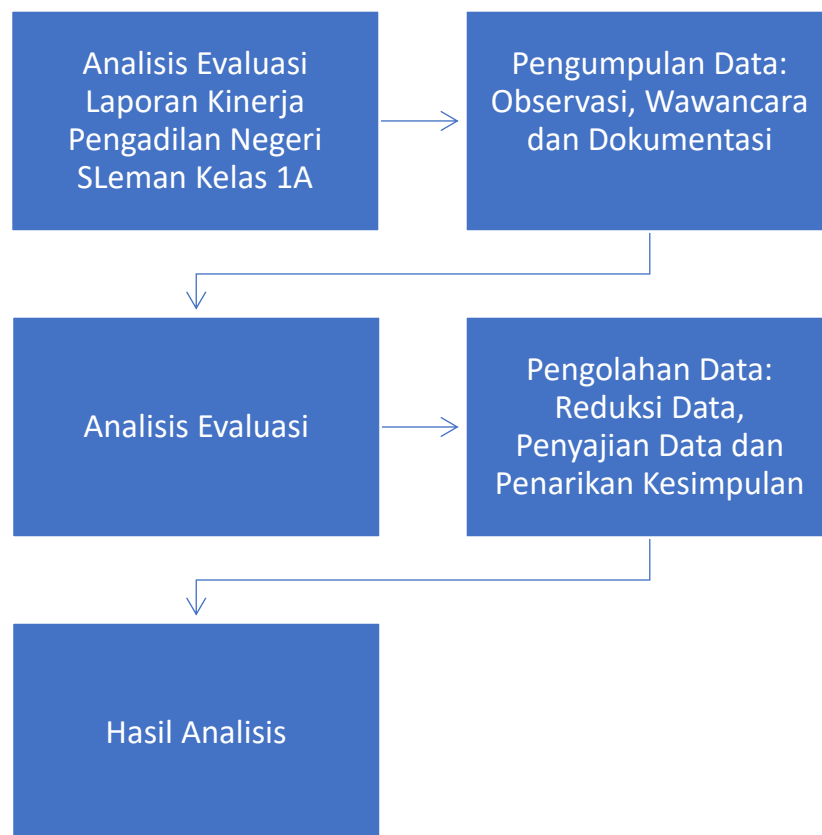
### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan dan menarik Kesimpulan dari data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan lalu dipilah data yang penting untuk dipelajari selanjutnya disimpulkan agar mudah dipahami. Tujuannya agar data yang semula masih mentah diubah menjadi informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah

penelitian. Menurut (Miles dan Huberman,1994) analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Langkah-langkah teknik analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman yaitu ada tiga tahapan :

1. Reduksi data (data reduction),yaitu menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data (data display),yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah di pahami. Bentuk penyajiannya berupa uraian naratif, table, grafik atau bagan alur dan kutipan hasil wawancara.
3. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing),yaitu melakukan interpretasi dan verifikasi terhadap hasil analisis untuk menjawab permasalahan mengenai efektifitas laporan kinerja dan akuntabilitas publik di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

### 3.7 Bagan Alur Penelitian



Gambar 3. 2. Bagan Alur Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG**

#### **4.1 Profil Instansi Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat**

Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yuridiksi di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam konteks akuntansi pemerintahan Pengadilan Negeri Sleman termasuk entitas pelaporan keuangan pemerintah pusat yang berada di bawah Unit Akuntansi Pembantu Anggaran (UAPPA) Mahkamah Agung RI. Kantor PN Sleman terletak di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Sebelum tahun 1972 wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih bergabung menjadi satu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada saat itu Pengadilan Negeri Yogyakarta terletak di Jln. Trikora yang sekarang menjadi kantor BAPAS. PN Sleman berdiri pada tahun 1972 yang pada waktu itu terletak di jalan Magelang Km.5 dusun Kutu Tegal Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman, dan menyewa pada rumah penduduk yaitu rumah Orang tua Bapak Wandu sampai pada tahun 1976, kemudian di tahun 1976 gedung Pengadilan Negeri Sleman diresmikan berdiri diatas tanah seluas 2730 m<sup>2</sup> yang hingga saat ini terletak di Jalan Beran, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman.

Pengadilan Negeri Sleman telah beroperasi sejak masa awal pembentukan Kabupaten Sleman dan terus berkembang mengikuti dinamika sistem peradilan nasional. Seiring dengan penerapan reformasi birokrasi dan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), PN Sleman telah melakukan berbagai inovasi pelayanan public berbasis digital, seperti penerapan e-court, PTSP online dan system informasi SIWAS MA-RI untuk pengaduan masyarakat.

Setiap lembaga atau instansi pemerintah dibentuk sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk keuntungan tetapi untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat luas dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dalam lingkup perdata dan pidana dan beberapa juga memiliki beberapa fungsi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata maupun pidana pada tingkat pertama, melaksanakan pelayanan hukum kepada Masyarakat pencari keadilan, menyediakan akses transparan terhadap proses peradilan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan mendukung pelaksanaan prinsip peradilan modern berbasis teknologi informasi. Didalam instansi Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A Yogyakarta memiliki stuktur organisasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, Hakim-hakim, Panitera, Sekretaris dan dibantu oleh staf kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai struktur organisasi yang diatur oleh Mahkamah Agung.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Visi : “Terwujudnya badan peradilan yang Agung khususnya Pengadilan Negeri Sleman”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman

### 4.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 474-1/SEK/KU.01/10/2015 perihal struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.



Gambar 4. 1. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A

Dalam struktur organisasi sekretaris terdapat Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepegawaian. Saya magang di bagian umum dan keuangan yang di kepalai oleh Bp Wirawan Dwi Asmara, S.I.P.

### 4.1.4 Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sleman adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada PN Sleman

berdasarkan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokok, PN Sleman juga disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang antara lain ; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan di wilayah hukum PN Sleman, apabila diminta. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan administrasi kepada Masyarakat pencari keadilan.
3. Menyusun laporan kinerja tahunan dan melakukan evaluasi atas capaian program kerja.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal sesuai prinsip akuntabilitas publik.

#### **4.1.5 Lokasi dan Fasilitas**

Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Instansi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang sidang elektronik, ruang PTSP, ruang mediasi, ruang pelayanan disabilitas serta sarana teknologi informasi untuk mendukung pelayanan public berbasis digital.

#### **4.1.6 Sistem Akuntansi Pemerintahan di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A**

Pengadilan Negeri Sleman merupakan bagian dari instansi pemerintah pusat, sistem akuntansi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A mengikuti kerangka Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), dengan sub-sistem sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi yang digunakan oleh

- kementrian/lembaga guna untuk mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan di tingkat instansi.
2. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan prosedur guna untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan anggaran sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Di PN Sleman bendahara terdapat 2 yaitu bendahara penerimaan dan pengeluaran.
  3. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) serangkaian prosedur guna untuk mencatat asset tetap seperti gedung, kendaraan dan peralatan kantor.
  4. Sistem Akuntansi Kinerja (SAKIP) adalah catatan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran program melalui Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dikonsolidasikan ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), lalu ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di Mahkamah Agung, dan kemudian menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **4.1.7 Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2009:20). Akuntansi publik tersebut merupakan prinsip utama yang dipegang Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A. Penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah,yaitu :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan.
3. Transparansi keuangan melalui publikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta realisasi anggaran di laman resmi pengadilan.
4. Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A prinsip akuntabilitas ini tidak hanya berlaku pada aspek keuangan namun juga berlaku pada kinerja layanan publik seperti penyelesaian perkara, pelayanan informasi serta manajemen SDM.

#### **4.1.8 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan**

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan yang bertanggung jawab terhadap :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
2. Pencatatan transaksi keuangan harian melalui aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual)
3. Pelaporan keuangan bulanan dan tahunan yang meliputi :
  1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  2. Neraca
  3. Laporan Operasional (LO)
  4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **4.1.9 Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual**

Sejak tahun 2015, sesuai dengan PP No.71 tahun 2010, Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan. Dengan system ini, seluruh pendapatan dan belanja diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A antara lain :

1. Memberikan Gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi keuangan instansi
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran
3. Menjadi dasar bagi penilaian kinerja keuangan secara lebih akurat.

## **4.2 Aktivitas Magang**

### **4.2.1 Gambaran Umum Tempat Magang**

- a. Nama Instansi : Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A
- b. Alamat : Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
- c. Website Resmi : <https://pn-sleman.go.id>
- d. Struktur organisasi: Pengadilan Negeri Sleman dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri, dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan beberapa Panitera Muda di bidang Pidana, Perdata, Hukum serta Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

### **4.2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Waktu Pelaksanaan : 1 Mei 2025 – 10 Agustus 2025
- b. Durasi : 3 bulan 10 hari
- c. Tempat Magang : Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, Subbagian Umum dan Keuangan
- d. Pembimbing Lapangan : Bp. Wirawan Dwi Asmara, S.I.P – Kepala Sub-bagian Umum dan Keuangan

### 4.2.3 Rencana Pelaksanaan Program Magang

Laporan program magang saya dengan judul “Analisis Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A” memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam memahami dan menganalisis proses penyusunan serta evaluasi kinerja instansi pemerintah dengan memahami mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kemudian menganalisis mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi kinerja dan mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses evaluasi kinerja lembaga publik.

Rencana pelaksanaan program untuk menyusun laporan magang disusun ke dalam beberapa tahap kegiatan yang mencakup observasi, partisipasi, hingga analisis terhadap proses pelaporan kinerja.

Tabel 4. 1. Rencana Pelaksanaan Program Magang

Tahap	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Hasil
Tahap 1 (Persiapan dan Orientasi)	Minggu 1-2	Masa pengenalan, pengarahan dan pembagian tugas oleh pembimbing lapangan. Pengenalan struktur organisasi, visi dan misi, serta SOP Pengadilan Negeri Sleman. Pengenalan atau studi awal tentang sistem pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja di	Mahasiswa memahami struktur organisasi, tugas pokok dan dasar hukum system kinerja instansi.

		instansi pemerintah (SAKIP dan LKjIP).	
Tahap 2 (Observasi Pelaksanaan Kinerja)	Minggu 3-6	Mengamati proses kerja tiap bagian dalam pengumpulan data capaian kinerja, Mengidentifikasi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Wawancara dengan staf tentang mekanisme evaluasi capaian target.	Data awal tentang system pengukuran kinerja dan prosedur evaluasinya.
Tahap 3 (Pengumpulan dan Analisis Data Kinerja)	Minggu 7-12	Mengumpulkan dokumen LKjIP, laporan capaian kegiatan, serta laporan keuangan. Melakukan Analisis kesesuaian antara target dan realisasi kinerja. Menilai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan.	Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif terkait efektivitas evaluasi kinerja.
Tahap 4 (Evaluasi dan Penyusunan Laporan Magang)	Minggu 13-14	Melakukan diskusi hasil analisis dengan pembimbing laporan. Menyusun proposal, laporan Tengah magang dan rekomendasi perbaikan sistem evaluasi.	Laporan magang yang komprehensif dan rekomendasi perbaikan berbasis temuan lapangan.

Metode yang saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, saya melakukan dengan berbagai metode :

1. Observasi Langsung, dengan melakukan pengamatan terhadap proses administrasi dan penyusunan laporan kinerja yang dilakukan oleh bagian keuangan dan bagian perencanaan.
2. Wawancara, dengan dilakukan oleh staff/pegawai di Subbagian Umum dan Keuangan serta pihak yang terlibat dalam penyusunan LKjIP, guna memperoleh informasi mendalam tentang sistem evaluasi kinerja.
3. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen seperti LkjIP, data DIPA, laporan realisasi anggaran.
4. Analisis Data, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **4.2.4 Uraian Pelaksanaan Program Magang**

Pelaksanaan program magang dengan berjudul “Analisis Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A” dilaksanakan selama 14 minggu, dimulai dari tanggal **1 Mei 2025 hingga 10 Agustus 2025**. Kegiatan magang yang saya lakukan berfokus ke dalam proses penyusunan, pengumpulan data dan analisis laporan kinerja (LKjIP), serta pengamatan langsung terhadap penerapan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A. Berikut uraian kegiatan mingguan :

##### **1. Minggu 1-2**

Pada minggu pertama, penulis mengikuti kegiatan orientasi dan pengenalan instansi. Mahasiswa magang diberikan pemahaman mengenai struktur organisasi yaitu terutama di struktur organisasi sub bagian umum dan keuangan yang

diketahui oleh Bapak Wirawan Dwi Asmara,S.I.P yang dibawah oleh bu sekretaris kemudian untuk bagian keuangan terdapat 2 bendahara yaitu bendahara penerimaan dan pengeluaran kemudian ada penanggung jawab keuangannya dan staff umum lainnya, tata tertib kerja di PN Sleman terutama untuk Mahasiswa Magang yaitu seperti masuk dan pulang mengikuti jam kerja PN Sleman yaitu di jam 8pagi – 5sore kemudian untuk pakaian menggunakan celana kain berjas almamater dan selalu menggunakan id card tanda pengenalan yang sudah di sediakan, serta system administrasi peradilan yang berlaku di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A. Penulis membaca dan pengenalan studi awal tentang akuntansi yang berjalan di instansi pemerintahan dengan sedikit berbeda dengan akuntansi keuangan pada umumnya. Akuntansi keuangan pada umumnya merujuk pada penyusunan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas sedangkan di akuntansi pemerintahan meliputi pencatatan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca serta audit keuangan. Penulis melakukan pengenalan pada bagian keuangan dan pelaporan yang fokus utamanya memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan serta prosedur pelaporan kinerja.

## 2. Minggu 3-6

Penulis mulai melakukan observasi pada bagian keuangan dan pelaporan. Penulis mengamati proses kerja tiap bagian dalam pengumpulan data capaian kinerja,Mengidentifikasi indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) Pengadilan Negeri Sleman dan indicator kinerja kegiatan (IKK) dan kemudian membandingkannya dengan realisasi capaian kinerja yang tercantum di LKjIP tahun 2024. Penulis melakukan pengumpulan data LKjIP tahun sebelumnya (2024)

termasuk dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan periodik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data empiris sebagai bahan analisis evaluasi kinerja.

Penulis mewawancarai staf tentang mekanisme evaluasi capaian target sebelum laporan disahkan oleh pimpinan. Analisis awal terhadap indikator kinerja dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang tercantum dalam LKjIP, penulis menggunakan pendekatan akuntansi pemerintahan dan teori Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup dimensi efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas hasil kerja lembaga. Dalam melakukan evaluasi kesesuaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### 3. Minggu 7-12

Kegiatan pada minggu ini penulis berfokus pada penyusunan hasil analisis data. Data yang telah dikumpulkan dari laporan keuangan dan dokumen kinerja kemudian dianalisis menggunakan pendekatan akuntansi pemerintahan berbasis kinerja dengan membandingkan antara input (sumber daya dan anggaran) dengan output (hasil kinerja) serta menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil sementara menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan sebagian besar kegiatan sesuai target, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada indikator pelayanan publik yang terkait dengan waktu penyelesaian perkara.

Dalam minggu minggu ini penulis juga mengenal berbagai aplikasi seperti penerbitan kwitansi yang di aplikasi SAKTI

dan beberapa aplikasi yang lainnya dan juga penulis ikut serta dalam pembuatan/penginputan slip gaji karyawan non-hakim dan hakim. Tukin (tunjangan kinerja) hanya berlaku di panitera kebawah, hakim sendiri mendapatkan tunjangan kinerja namun dengan istilah yang berbeda yang telah melekat pada gaji hakim tersebut yaitu penghasilan pejabat negara. Tunjangan kinerja itu berkaitan dengan PCK yang memiliki potongan hingga 25% dengan sisanya total absensi. Untuk aplikasi ekinerja (3bulan) semua ASN wajib membuat aplikasi tersebut dikarenakan koneksi ke BKN.

#### 4. Minggu 13-14

Penulis melakukan diskusi dan validasi data dengan pembimbing lapangan dan bagian pelaporan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis yang disusun telah sesuai dengan data faktual lembaga.

Pada minggu terakhir magang, penulis menyusun laporan akhir magang yang berisi hasil analisis evaluasi kinerja, serta refleksi pribadi terhadap pengalaman belajar di instansi.

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN HASIL**

#### **5.1 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja**

Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai instansi pemerintah, PN Sleman wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, terutama melalui penyusunan LKjIP dan publikasi informasi pelayanan Masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang yakni masyarakat, pemerintah pusat, DPR, BPK dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana laporan kinerja telah memenuhi prinsip good governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas juga dapat mencerminkan sejauh mana instansi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penganggannya. Berikut merupakan analisis yang saya susun berdasarkan hasil pengamatan selama magang, telaah dokumen kinerja serta pengamatan terhadap sistem pelayanan publik dan administrasi di PN Sleman :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok, PN Sleman telah melaksanakan fungsi peradilan pidana, perdata, serta pelayanan administrasi hukum. Capaian target penyelesaian perkara setiap tahun relatif tinggi, dan sebagian besar perkara diselesaikan dalam batas waktu standar MA.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, PN Sleman telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan transparan, yang terbukti dari tingginya tingkat

penyelesaian perkara serta kepatuhan terhadap standar waktu Mahkamah Agung. Kesesuaian antara perencanaan dan capaian kinerja menunjukkan efektivitas pengelolaan perkara, sementara keterbukaan informasi peradilan mendukung pengawasan publik.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, PN Sleman mengalokasikan dana untuk operasional peradilan, layanan publik dan dukungan administrasi. Realisasi anggaran yang direalisasikan cukup tinggi (>90%) yang menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dananya bagus.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, akuntabilitas anggaran perlu ditingkatkan dengan menghubungkan secara jelas antara anggaran-output-outcome.

3. Pengukuran dan Indikator Kinerja, PN Sleman telah menggunakan standar indikator kinerja MA seperti tingkat penyelesaian perkara, waktu penyelesaian perkara, indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dan pelaksanaan zona integritas. Indikator tersebut sudah terukur dan diaplikasikan di PN Sleman namun, masih cenderung menilai output bukan outcome.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, untuk kualitas indikator cukup baik, tetapi dalam meningkatkan akuntabilitas diperlukan indikator outcome, seperti tingkat kepuasan pengguna layanan per perkara, efektivitas e-court dsb.

4. Dokumentasi dan Bukti Capaian, PN Sleman ada menyusun laporan pelayanan, dokumen perkara dan SOP yang tersedia dengan baik.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, dokumentasi internalnya kuat namun untuk dokumentasi yang dapat diakses public masih terbatas sehingga memengaruhi akuntabilitas eksternal.

Analisis Transparansi di PN Sleman dinilai melalui keterbukaan informasi public, layanan digital, kemudahan akses dokumen serta kualitas penyampaian informasi kepada Masyarakat. Transparansi itu sendiri diukur dari sejauh mana instansi membuka akses informasi kepada public, baik terkait anggaran, rencana maupun capaian kinerja. Berikut merupakan analisis transparansi kinerja di PN Sleman yang saya amati :

1. Ketersediaan/Keterbukaan Informasi Publik

Di PN Sleman memiliki website resmi dengan kanal layanan publik, jadwal sidang, profil instansi, biaya perkara dan informasi perkara (SIPP). Website biasa dikelola secara baik dan secara rutin. Namun ada beberapa dokumen penting seperti LKjIP, laporan realisasi anggaran dan laporan pengawasan internal tidak selalu ditampilkasn secara lengkap atau mudah diakses.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, transparansi informasi PN Sleman cukup baik tetapi perlu meningkatkan publikasi dokumen kinerja dan keuangan.

2. Transparansi Proses Peradilan

System informasi penelusuran perkara (SIPP) di PN Sleman menyediakan data lengkap mengenai jadwal sidang, status perkara dan putusan. Masyarakat publik dapat mengakses informasi secara real time dan mudah melalui website resmi yang ada di PN Sleman.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, transparansi proses peradilan PN Sleman sangat baik karena mengikuti standar MA dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

3. Layanan Publik dan Keterbukaan Biaya

Informasi layanan publik di PN Sleman terdapat informasi biaya layanan terpampang di meja pelayanan dan website adanya implementasi e-Court dan e-Payment guna meningkatkan transparansi biaya perkara dan mengurangi potensi pungutan liar. Masyarakat dapat mengecek jumlah

biaya perkara tanpa harus datang ke PN cukup dengan membuka website resmi PN Sleman.

Analisis : berdasarkan hasil analisis, transparansi biaya dan layanan PN Sleman sudah sangat baik dan mendukung zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

#### 4. Kemudahan Akses Laporan Kinerja

Akses laporan kinerja di PN Sleman setiap tahun selalu sesuai PermenPAN RB namun tidak semua bagian dipublikasikan secara lengkap. Ringkasan kinerja untuk Masyarakat umum belum tersedia dalam format yang mudah dipahami.

Analisis : berdasarkan hasil analisis,transparansi pelaporan kinerja PN Sleman masih perlu ditingkatkan terutama pada penyajian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk publik.

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi saya selama program magang terdapat beberapa temuan utama yakni:

1. akuntabilitas tugas pokok sudah baik namun kecepatan penyelesaian perkaranya perlu dipantau secara lebih ketat.
2. Akuntabilitas anggaran sangat memadai
3. Indikator kinerja yang baik namun masih berfokus pada output
4. Transparansi pelayanan public dan proses peradilan sangat baik terutama melalui SIPP, e-Court dan e-Payment.
5. Transparansi laporan kinerja masih terbatas terutama terkait publikasi LPjIP dan laporan pendukung lainnya.

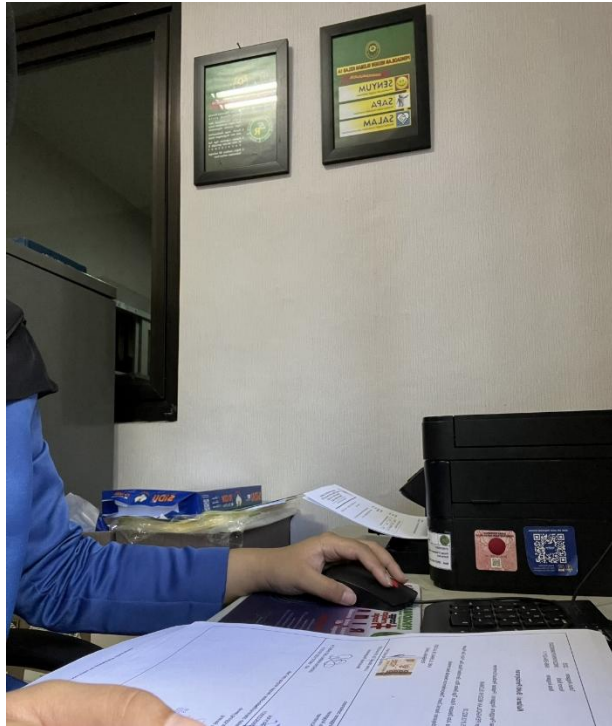
Saya juga menemukan beberapa rekomendasi peningkatan dari segi akuntabilitas maupun transparansi. Untuk **peningkatan akuntabilitas** PN Sleman dapat memperkuat penilaian kinerjanya berbasis outcome tidak hanya output saja, menyajikan analisis penyebab keterlambatan perkara dalam laporan kinerja, meningkatkan pelaporan hubungan anggaran-hasil

untuk memperkuat Value for Money dan melengkapi dokumentasi bukti capaian kinerja. Kemudian untuk **peningkatan transparansi** PN Sleman dapat memperluas publikasi LKjIP, laporan anggaran dan hasil pengawasan di website, Menyusun ringkasan kinerja public yang mudah dipahami, memperkuat keterbukaan data pelayanan dashboard digital dan meningkatkan sosialisasi layanan digital seperti e-court dan PTSP online.

Selain melakukan pengamatan, dokumentasi juga diperlukan sebagai pendukung dalam kegiatan magang di Pengadilan Negeri Slemann Kelas 1A. berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan magang saya di PN Sleman.



*Gambar 5. 1. Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan*



*Gambar 5. 2. Dokumentasi Kegiatan Scan Berkas Laporan dan Kwitansi*



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil magang dan analisis evaluasi laporan kinerja pada Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A secara umum telah berjalan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan tingkat pertama.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sleman telah mencerminkan prinsip akuntabilitas, baik melalui penyelesaian perkara, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan pelayanan public. Penyelesaian perkara setiap tahunnya menunjukkan capaian yang tinggi dan konsisten dengan target Mahkamah Agung, terutama dalam aspek penyelesaian perkara tetap waktu, ketertiban administrasi serta pemanfaatan teknologi seperti SIPP dan e-Court. Namun demikian terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bisa diperkuat. Misalnya seperti evaluasi penyebab keterlambatan perkara yang belum terdokumentasi sistematis, analisis beban kerja unit belum sepenuhnya menjadi dasar pembagian tugas kemudian hubungan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran belum sepenuhnya dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, walaupun akuntabilitas secara normative dan operasional sudah berjalan, akuntabilitas analitis dan evaluative masih memerlukan penguatan.

Kemudian untuk transparansi kinerja yang berjalan di PN Sleman sudah baik, transparansi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan pengadilan yang modern dan terpercaya. Di Pengadilan Negeri Sleman, mekanisme transparansi telah didukung oleh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menampilkan jadwal sidang, majelis hakim, status perkara dan putusan secara real-time. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah menyediakan layanan informasi biaya, tahapan proses hukum dan prosedur permohonan, keterbukaan informasi pada aspek-aspek tersebut tergolong sangat baik namun, transparansi dalam bentuk publikasi dokumen strategis seperti LKjIP, Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan dan Laporan Anggaran dan Realisasinya masih belum optimal karena beberapa dokumen tersebut sudah tersedia namun tidak diperbarui di setiap tahun dan formatnya belum ramah publik. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kinerja sudah berjalan dengan baik pada aspek pelayanan dan informasi perkara tetapi perlu ditingkatkan pada aspek perencanaan dan pelaporan organisasi secara menyeluruh.

Kualitas penyusunan laporan kinerja PN Sleman sudah sistematis, dalam laporan kinerja PN Sleman telah disusun sesuai PermenPAN RB No 53 tahun 2014 dengan struktur laporan mencakup perjanjian kinerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, analisis pencapaian indikator serta faktor pendukung dan penghambat. Namun untuk kualitas laporan masih dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek seperti ; indikator masih dominan output seperti jumlah perkara yang diselesaikan bukan outcome seperti peningkatan kepercayaan public atau efektivitas pelayanan, analisis pencapaian kinerja kadang belum didukung data pembanding yang kuat, hubungan antara anggaran dengan hasil belum dijelaskan melalui pendekatan Value for Money. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan sudah baik secara administratif.

Pemanfaatan teknologi di PN Sleman sangat mendukung akuntabilitas dan transparansi dengan memanfaatkan teknologi seperti system SIPP, e-Court, e-Register, e-Payment, e-SKM dan pengaduan online. Teknologi tersebut sangat membantu keterbukaan informasi, mempercepat proses pelayanan dan memperkecil penyimpangan namun, implementasi teknologi masih menghadapi hambatan seperti tidak semua pencari keadilan memahami alur layanan digital, beberapa Masyarakat masih mengandalkan pelayanan manual, kemudian untuk beban pemeliharaan system IT masih membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dibidang IT. Dengan demikian teknologi yang semula menjadi kekuatan utama dalam tata kelola modern harus bergantung pada edukasi publik dan dukungan SDM disekitar.

Pengalaman magang memberikan saya banyak pemahaman yang nyata tentang Good Governance di lingkungan peradilan. Beberapa pemahaman yang langsung saya peroleh seperti alur pelayanan public di PN Sleman, mekanisme penyelesaian perkara, pentingnya SOP dalam mengukur akuntabilitas, peran PTSP sebagai garda terdepan pelayanan, memahami adanya perbedaan mengenai laporan keuangan umum dan laporan keuangan pemerintahan, penyusunan laporan kinerja.

## **6.2 Saran**

Setelah menyelesaikan magang di sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A terdapat beberapa saran yang dapat saya berikan. Saran ini dirangkum berdasarkan hasil analisis dan temuan selama kegiatan magang dengan harapan untuk dapat meningkatkan system akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

1. Instansi bisa menambah indikator yang bisa mengukur dampak pelayanan seperti kepuasan public, pasca penyelesaian perkara, tingkat efektivitas pelayanan PTSP dan tingkat kepercayaan public yang bukan hanya output saja namun outcome juga.

2. Instansi bisa mengoptimalkan publikasi dokumen kinerja dan laporan anggaran agar transparansi meningkat dengan cara memperbarui LKjIP,RKT dan Renstra secara rutin di website resmi PN Sleman. Informasi laporan tersebut di buat dalam bentuk infografis agar lebih mudah dipahami oleh Masyarakat umum.
3. Penguatan dokumentasi dan integrasi system informasi internal dengan adanya keberadaan basis data digital dapat memudahkan proses evaluasi, pengawasan dan pelaporan.
4. Meningkatkan edukasi public terkait layanan digital peradilan yang telah tersedia guna untuk meningkatkan pemanfaatan layanan digital dan dapat memperluas jangkauan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Armstrong, M., & Baron, A. (2005). Performance Management: A Strategic and Integrated Approach. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)*

*Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-468*

*Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

*Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja*

*Mahkamah Agung RI. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

*Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN*

*Mahmudi (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN*

*Mahsun, M (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE Yogyakarta*

*Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi*

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*

.  
*Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.*

*Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Terakhir*

.  
*Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. Rencana Kerja Tahunan.*

*Portal SIPP Mahkamah Agung: <https://sipp.mahkamahagung.go.id>*

*Robbins, S.P. (2017). Organizational Behavior (17th ed.). Pearson*

*Schwarz, R. (1999). The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers and Coaches. Jossey-Bass*

*'Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah' oleh Indra Kristian dkk., Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial [jurnaldialektika.com](http://jurnaldialektika.com)*

*Website Resmi Pengadilan Negeri Sleman: <https://pn-sleman.go.id>*

## LAMPIRAN

### *Hasil Wawancara terhadap Bendahara Penerimaan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA*

*Narasumber : Bendahara Penerimaan PN Sleman Kelas IA*

1. Apakah Tunjangan Kinerja berlaku untuk semua staff (hakim/non hakim) di PN Sleman ? Hasil wawancara menjelaskan bahwa “tunjangan kinerja atau TUKIN hanya berlaku di panitera kebawah, staff hakim menggunakan tukin namun dengan istilah yang lain yakni tunjangan penghasilan pejabat negara yang langsung melekat pada gaji”.
2. Mengapa pelaporan kinerja itu wajib di buat di instansi Pengadilan Negeri Sleman? Hasil wawancara menjelaskan bahwa “pelaporan kinerja tersebut ada di setiap 3bulan sekali yakni di ekinerja, semua ASN wajib membuat dikarenakan pelaporan tersebut koneksi ke BKN”.
3. Apakah seluruh informasi kinerja, seperti jumlah perkara, putusan dan layanan dipublikasikan secara lengkap dan tepat waktu? Hasil wawancara menjelaskan bahwa “Unit kerja umum PTSP,kepaniteraan dan bagian perencanaan secara rutin menyampaikan data perkara,putusan dan layanan berdasarkan pemantauan internal yang publikasi kinerja pada umumnya dilakukan secara berkala. Jika ada keterlambatan biasanya disebabkan oleh verifikasi data yang harus tepat dan konsisten.”
4. Apakah capaian kinerja bagian keuangan, terutama PNBP, menjadi bagian dari evaluasi LKjIP setiap akhir tahun ? Hasil wawancara menjelaskan bahwa “ya, capaian kinerja PNBP menjadi bagian penting dalam penyusunan dan evaluasi LKjIP karena sebagai bendahara penerimaan, saya bertanggung jawab untuk menyajikan data realisasi PNBP, tingkat pencapaian target PNBP, menyampaikan analisis penyerapan dan penyetoran PNBP.”
5. Apakah Laporan Kinerja Pengadilan disusun sesuai dengan pedoman evaluasi kinerja lembaga peradilan ? Hasil wawancara menjelaskan bahwa “penyusunan laporan kinerja (LKjIP) memang mengikuti pedoman resmi yakni, peraturan

Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PermenPANRB) tentang SAKIP dan pedoman evaluasi kinerja lembaga peradilan dari badan pengawasan.”

## Surat Pengantar Magang



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Universitas Islam Indonesia  
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 885376  
F. (0274) 882589  
E. fbe@uii.ac.id  
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 098/Prodi.Akt/Magang-Mandiri/2025  
Perihal : Permohonan Magang Mahasiswa Tugas Akhir 19 SKS

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu. Pimpinan**

**Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman Yogyakarta**

Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Program Studi (Prodi) Akuntansi Program Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE), Universitas Islam Indonesia (UII) mengizinkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan **Magang sebagai Tugas Akhir dengan bobot 19 SKS**. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon Ibu/Bapak berkenan untuk dapat menerima mahasiswa berikut untuk melaksanakan kegiatan magang pada Instansi/Perusahaan yang Ibu/Bapak pimpin:

**Nama : Sofiani Oktafiana Putri**  
**NIM : 21312287**

Demikian surat ini, atas perhatian dan kesediaan Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 April 2025  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Program Sarjana FBE UII



Prof. Rafiq Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.  
033120104

Surat Izin Magang dari Instansi



**PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telepon/Faksimile: (0274) 868401

Surel: pnsleman@yahoo.co.id , Laman: <http://pn-sleman.go.id>


Nomor : 1028 /PAN.PN.W13.U2/HM.2.1.2N/2025 Sleman, 16 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Permohonan Magang

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi  
Program Sarjana FBE UII  
Di Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan saudara tertanggal 23 April 2025 nomor 098/Prodi.Akt/Magang-Mandiri/2025 sesuai dengan pokok surat, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Sleman tidak keberatan menerima mahasiswa atas nama Sofiani Oktafiana Putri melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Sleman.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Ketua Pengadilan Negeri Sleman  
Pantera

  
Dr. Sumargi, S.H., M.H.

## Sertifikat Magang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA  
Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telepon/Faksimile : (0274) 868401  
Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Laman: <http://pn-sleman.go.id>

### SURAT KETERANGAN MAGANG

NOMOR: 1886/PAN.PN/W13.U2/IX/KUM.07.10/2025

Kami Ketua Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

#### SOFIANI OKTAFIANA PUTRI

No. Mahasiswa : 21312287  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Angkatan Tahun : 2021

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. Magang kerja tersebut telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai tanggal 1 Mei 2025 s/d 10 Agustus 2025. Pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama magang dengan baik dan telah menyelesaikan laporan magang yang berjudul "Analisis Evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA".

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 8 September 2025  
A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
Plt. PANITERA

HAMMAM HARIS, S.H.